

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Hasil Penelitian**

Deskripsi temuan penelitian dimaksudkan untuk menyajikan data penelitian yang telah dimiliki agar dapat sesuai dan relevan dengan pokok permasalahan yang telah dibahas di dalam penelitian ini. Penelitian ini membahas mengenai peran jaringan sosial Pemerintah Kabupaten Magelang dalam upaya menurunkan jumlah angka *Stunting*. Penelitian Upaya Pencegahan *Stunting* yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dengan lokasi *sampel* penelitian di Kecamatan Sawangan. Kecamatan Sawangan merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Sawangan mempunyai luas 1.234.850 hektar yang berbatasan dengan sebelah Utara : Kecamatan Candimulyo dan Pakis. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. Kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Dukun dan Kecamatan Muntilan. Kemudian sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mungkid. Kecamatan Sawangan ini terdiri dari 15 desa. Kondisi geografis tersebut menjadikan aktivitas ekonomi dan sosial penduduk mudah untuk diakses karena jarak dari desa ke kota dekat.

Perlu diketahui bahwa *stunting* ini merupakan suatu kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan stimulasi psikososial serta paparan infeksi berulang terutama di dalam 1000 hari pertama kehidupan (HPK). 1000 hari pertama kehidupan ini dimulai dari 270 hari dalam kandungan. Sementara itu, kelompok sasaran pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* diantaranya yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, anak berusia 0-23 bulan, anak berusia 24-59 bulan. Dalam Kabupaten Magelang ini *Stunting* masih menjadi masalah yang sangat kompleks khususnya di Kecamatan Sawangan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Sawangan untuk mencegah *stunting* adalah menjalin relasi jaringan sosial. Jaringan sosial merupakan hubungan-hubungan

yang diciptakan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok dengan kelompok yang lain baik secara formal maupun non formal. Hubungan ini adalah gambaran dari kerja sama yang didasarkan terhadap ikatan sosial yang aktif dan bersifat timbal balik satu sama lain (Damsar, 2009). Dalam lingkup ini Pemerintah Kecamatan Sawangan mengembangkan jaringan sosial baik secara internal dengan pihak kecamatan atau masyarakat di Kecamatan Sawangan maupun dengan pihak eksternal atau pihak dari luar Kecamatan Sawangan. Penjelasan lebih jelasnya mengenai jaringan sosial yang dikembangkan Pemerintah Kecamatan Sawangan diuraikan sebagai berikut :

Pembentukan Tim Percepatan dalam Penanganan *Stunting* untuk menangani dan menanggulangi *Stunting* dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak yang terlibat seperti dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Magelang, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Sawangan, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Sawangan, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawangan, Fatayat/Aisyiyah, Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Magelang, dan masih banyak lainnya, dalam mencegah *stunting* ini terdapat konvergensi. Konvergensi merupakan sebagai sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terpadu, terkoordinir, dan bersama-sama terhadap sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mengatasi *stunting*. Intervensi dilakukan dengan mengintegrasikan atau menggabungkan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Pencegahan *Stunting* dapat dilakukan dengan melalui intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Penyelenggaraan intervensi yang terpadu untuk menyoal kelompok prioritas sebagai kunci keberhasilan tumbuh kembang anak, perbaikan gizi, dan pencegahan *Stunting*. Konvergensi ini merupakan seperangkat kegiatan pemerintah Kabupaten atau Kota di dalam memperbaiki manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar agar lebih terpadu dan sesuai sasaran terhadap

rumah tangga prioritas untuk mencegah *Stunting* dan target sasaran wilayah geografis.

Penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya agar dapat mencapai tujuan. Kontribusi intervensi perbaikan gizi, Intervensi spesifik, ini kegiatannya dilakukan terhadap sektor kesehatan, dengan kegiatannya seperti imunisasi, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) terhadap ibu hamil, pertumbuhan balita posyandu. Intervensi spesifik, upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara langsung, dimana sasaran khusus kelompok adalah 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) ibu hamil, ibu menyusui dan anak 0-23 bulan. Sementara intervensi sensitif, upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara tidak langsung, berbagai kegiatan pembangunan pada umumnya non kesehatan, kegiatan antara lain penyediaan air bersih, penyediaan jembatan keluarga, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Keluarga Harapan (PKH). Sasaran masyarakat umum tidak khusus untuk 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kontribusinya 70 persen. Berikut ini data *Stunting* di Kabupaten Magelang.

Sumber data Aplikasi Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) :

**Tabel 3.1 Jumlah balita yang diukur *Stunting***

| Tahun | Jumlah Balita yang Diukur                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 2019  | 5,193 balita <i>Stunting</i> dari jumlah balita yang diukur 30,494. |
| 2020  | Balita <i>Stunting</i> 9.040 dari jumlah balita yang diukur 44.689  |
| 2021  | balita <i>Stunting</i> 10.503, jumlah balita yang diukur 71,169     |
| 2022  | balita <i>stunting</i> 9.897 dan jumlah balita yang diukur 75, 475  |

|      |                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | balita yang mengalami <i>Stunting</i> adalah 8.261 dari jumlah balita diukur |
|------|------------------------------------------------------------------------------|

Pelaksanaan Aksi Konvergensi *Stunting*, dilakukan dengan melakukan beberapa aksi diantaranya :

**Tabel 3.2 Aksi penurunan *stunting***

| No | Aksi                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Analisis Situasi                                                         |
| 2  | Penyusunan Rencana Kegiatan                                              |
| 3  | Rembuk <i>Stunting</i>                                                   |
| 4  | Peraturan Bupati/Walikota tentang percepatan penurunan <i>stunting</i> . |
| 5  | Pembinaan pelaku dan pemerintahan Desa/kelurahan                         |
| 6  | sistem manajemen data                                                    |
| 7  | Pengukuran dan Publikasi <i>Stunting</i>                                 |
| 8  | Review Kinerja Tahunan                                                   |

Analisis Situasi ini dilakukan dengan melakukan upaya pencegahan yaitu : Intervensi spesifik dimana dengan fokus sasaran kelompok yang umumnya dilakukan sektor kesehatan dengan kontribusi 30 persen.

Intervensi percepatan penurunan *stunting* yaitu dengan remaja putri menjalani skinning anemia, remaja putri mengkonsumsi tablet tambah darah, ibu hamil menjalani pemeriksaan kehamilan, ibu hamil mengkonsumsi tablet tambah darah 50 tablet selama kehamilan, Ibu hamil kurang energi kronik mendapat

tambahan asupan gizi, pemantauan pertumbuhan balita, Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat asi eksklusif, bayi mendapatkan imunisasi, Desa/kelurahan bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS), balita kurang gizi mendapatkan tambahan asupan gizi, screening anemia, Konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan, pemberian makanan tambahan, Pemantauan tumbuh kembang, asi eksklusif, Pemberian makanan hewani bagi bawah dua tahun (baduta), tatalaksana bawah lima tahun (balita) pada masalah gizi, peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi, edukasi remaja, ibu hamil, dan keluarga balita.

*“...Intervensi Spesifik Sebelum hamil Yaitu dengan Screening anemia, Pemeriksaan kesehatan termasuk kadar hemoglobin siswi kelas 7 & 10, Konsumsi tablet tambah darah yaitu dengan pemberian tablet tambah darah setiap Minggu di sekolah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan kehamilan. Pelaksanaan antenatal care yaitu 2 kali dengan dokter, termasuk penggunaan Ultrasonografi (USG), mengkonsumsi tablet tambah darah terhadap ibu hamil (minimal 90 terhadap kehamilan), dan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang berupa protein hewani.” (Hasil wawancara dengan Bapak H, 54 Ketua Penyuluh KB Kecamatan Sawangan, 1 Desember 2023).*

Setelah lahir dilakukan pemantauan tumbuh kembang, penimbangan, pengukuran panjang badan, dan pemantauan perkembangan balita di Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) setiap bulan.

Hal ini sesuai apa yang dikatakan oleh Bapak H, selaku Kepala Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Sawangan.

*“Anak yang terindikasi Stunting di bawah usia 2 tahun diberikan asi eksklusif, pemberian asi eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan, pemberian makanan tambahan protein hewani bagi baduta. Baduta adalah anak berusia 12-23 bulan berupa telur dan sumber protein hewani lainnya, tatalaksana balita dengan masalah gizi. Upaya lainnya yang dilakukan adalah dengan mengajak balita dengan weight feiten ening & masalah gizi dari posyandu ke*

*puskesmas, serta memberikan makanan tambahan untuk weight feiting dan gizi kurang, formula 75 dan formula 100 untuk gizi buruk merujuk balita Stunting dan masalah gizi yang tidak tertangani di puskesmas dan ke rumah sakit dengan memberikan PKMK. Peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi dengan melalui pelayanan rutin, kampanye bulan imunisasi dasar dan 3 imunisasi tambahan PCV untuk mencegah pneumonia dan mencegah diare sehingga mencegah terganggunya pertumbuhan” (Hasil wawancara dengan Bapak H, 54, Ketua Penyuluh KB Kecamatan Sawangan, 1 Desember 2023).*

Intervensi sensitif yaitu dengan melalui Edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses air minum dan sanitasi, menjamin pemenuhan asupan gizi, dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Dalam menurunkan jumlah angka *Stunting* dibutuhkan peran dari berbagai *stakeholders* untuk menurunkan jumlah angka *Stunting*. Hal ini dikatakan oleh Bapak Heru selaku narasumber.

*“Peran serta stakeholders dalam upaya penurunan stunting diantaranya dari perguruan tinggi seperti UMM, UGM, UMBY Yogyakarta, Untidar, UNY, Universitas Alma Ata, UNNES. Selain dari perguruan tinggi, di dalam upaya menurunkan jumlah angka Stunting, pihak pemerintah Kabupaten Magelang juga bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat seperti Foodbank of Indonesia, Yakkum Emergency Unit, Forum anak Magelang, organisasi masyarakat, Aisyiah, Muslimat, TP PKK, dan Fatayat. Selain dari organisasi masyarakat, untuk menurunkan jumlah angka Stunting juga dilakukan dari dunia usaha seperti Bank Bapas 69, BNI 46, Bank Jateng, TWC Borobudur, PDAM, TELKOM, dan BKK Muntilan. Kemudian dari sisi masyarakat juga turut serta dalam menurunkan jumlah angka Stunting seperti Baznas, adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, dari sisi pemerintah sendiri yaitu menetapkan indikator dan arah kebijakan strategi, menyusun RAD dan LAP Monev, Sosialisasi dan fasilitas kerja sama, meningkatkan kapasitas, memantau*



dan evaluasi, menyusun *policy paper* sebagai bahan masukan pemerintah. “ (Wawancara Bapak H, 54, Ketua Penyuluh KB Kecamatan Sawangan, 1 Desember 2023).

Upaya untuk mencegah *stunting* yang dilakukan dari beberapa Kegiatan dari Multipihak dalam Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* yaitu:

- 1 Gerakan Cegah *Stunting* Melalui Perbaikan Pola Asuh dan Konsumsi Sehari Satu Telur/GASPOL DULUR (Dinkes)
- 2 Tilik Simbok (PC Fatayat NU)
- 3 Pendampingan Calon Pengantin, Ibu hamil, dan pasca salin oleh TPK (Dinsos PPKB PPPA).
- 4 Mini Lokakarya Kecamatan (Dinsos PPKB PPPA)
- 5 PKK Milenial (Tim Penggerak PKK)
- 6 Rumah Gizi Sehat (PD Aisyiah)
- 7 Gerakan Minum susu dan Minum Telur/Gerimislur (Dispeterikan)
- 8 KKN Tematik *Stunting* (Universitas)
- 9 Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS)
- 10 Kampung KB terintegrasi
- 11 Intervensi Balita Beresiko dan Balita *Stunting* di Lokus di Desa P3KE.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nanik Susilowati terdapat kendala dan hambatan di dalam percepatan penurunan *stunting*, diantaranya yaitu mekanisme terkait intervensi spesifik, khususnya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita yang belum maksimal, balita gizi kurang belum maksimal mendapatkan asupan gizi, serta program dan kegiatan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektoral kurang tertuju terhadap desa lokus *stunting*.

“Kendala dan hambatan dalam percepatan penurunan *stunting* yaitu mekanisme terkait intervensi spesifik khususnya PMT terhadap balita yang belum maksimal, dalam balita gizi belum maksimal, dan program serta kegiatan dari OPD lintas sektoral kurang tertuju terhadap desa lokus *stunting*.” (Wawancara

Ibu NS, 45, Ketua Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 11 Desember 2023)

Kemudian terdapat upaya di dalam menyelesaikan masalah yaitu dengan memperkuat peran dan fungsi Tim Percepatan Penurunan *Stunting*, adanya rencana lanjutan di dalam upaya percepatan penurunan *stunting*, membahas secara koordinatif melalui forum Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) yang berhubungan dengan pemenuhan penyediaan data irisan dan pelaksanaan program kerja yang telah sistematis dan tepat sasaran yang tertuju terhadap lokus *Stunting*. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Magelang juga melakukan berbagai upaya diantaranya rapat koordinasi, penyerahan bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), penancangan kampung berkualitas, adanya tebug *Stunting* dan mini lokakarya, serta sosialisasi terhadap Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk pemantauan risiko *Stunting*. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu :

*“Upaya yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Magelang seperti rapat koordinasi TPPS Kabupaten Magelang, diselenggarakannya rapat koordinasi TPPS tingkat kecamatan, penyerahan bantuan PMT terhadap anak Stunting di Kecamatan Mertoyudan, penancangan kampung keluarga berfasilitas yang didalamnya terdapat program Dashat (Dapur Sehat Alami Stunting), mini lokakarya dan rembug Stunting tingkat kecamatan dilakukan di sejumlah kecamatan di Kabupaten Magelang, sosialisasi terhadap TPK untuk melakukan pemantauan risiko Stunting. (Wawancara Ibu NS, 45, Ketua Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 11 Desember 2023).*

Kemudian terdapat Upaya Tindak Lanjut yaitu intervensi *Stunting* lebih difokuskan di lokasi prioritas, kolaborasi Multi pihak (non pemerintah), baik dalam bentuk kegiatan dan pendanaan dalam intervensi *Stunting* ke depan diharapkan semakin meningkat, optimalisasi penggunaan dana desa dalam upaya penanggulangan dan penurunan *stunting* di desa, monitoring dan evaluasi untuk melihat sejauh mana efektifitas intervensi yang telah dilakukan, memberikan



apresiasi terhadap desa dan kecamatan dengan zero *stunting*, dan Integrasi hasil analisis situasi dan program kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan. Hal ini juga dinyatakan oleh narasumber yaitu Bapak H yaitu:

*“Upaya tindak lanjut yaitu intervensi Stunting lebih difokuskan di lokasi prioritas, kolaborasi multi pihak (non pemerintah), baik berupa kegiatan dan pendanaan dalam intervensi Stunting ke depan diharapkan semakin meningkat, optimalisasi penggunaan dana desa di dalam penanggulangan dan penurunan stunting di desa, monitoring dan evaluasi untuk melihat sejauh mana efektivitas intervensi yang telah dilakukan, memberikan apresiasi terhadap desa dan kecamatan dengan zero Stunting dan integrasi hasil analisis situasi situasi dan program kegiatan di dalam dokumen perencanaan pembangunan.”*(Wawancara Bapak H, 54, Ketua Penyuluh KB Kecamatan Sawangan)

Keputusan Bupati Magelang Nomor :

180.182/129/KEP/09/2022 Tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kecamatan Se-kabupaten Magelang, Konsentrasi Penguatan Sistem dalam Pencegahan *Stunting*, Penyusunan anggaran pencegahan *Stunting* dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Struktur anggaran pencegahan *Stunting* non fisik disusun untuk menjangkau tahap pra kehamilan, masa kehamilan, dan balita.

-Pembentukan data terpadu, membuat data terpadu dari setiap unsur penyusun data (Balai Keluarga Berencana dan puskesmas sebagai pembangunan aksi nyata lintas sektoral.

-Sedekah atau gotong royong penanggulangan *stunting*

Mengajak organisasi atau kelompok masyarakat seperti Muslimat, Aisyiyah, Kelompok Wanita Tani untuk melakukan sedekah bagi keluarga risiko *Stunting*/anak *stunting*. Struktur Anggaran Pencegahan *Stunting* (Ridwan, 2023) Sejak penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yaitu tentang Sarana prasarana untuk mengurangi risiko *Stunting* seperti sanitasi, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan lain-lain.

Non Fisik, dengan melalui :

1 Pra nikah/kehamilan

Sosialisasi untuk mencegah pernikahan dini, pendampingan catin, membentuk forum edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Skrining kesehatan, Support gizi, dan kapsul.

2 Masa kehamilan

Pemantauan pemeriksaan, support gizi, kelas ibu hamil, forum peningkatan peran suami bumil.

3 Balita

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Forum pendampingan tumbuh kembang anak.

Awal Mula Pembentukan Data Terpadu, diawali dari Rembug *Stunting* Kecamatan Tanggal 3 Juli 2023, kemudian dilanjutkan mini lokakarya Tingkat Kecamatan Tanggal 12 Juli 2023, muncul gagasan untuk mencoba melakukan sinkronisasi data dari para penyusun data rutin setiap bulan untuk digunakan dalam penanganan *Stunting*. Kemudian terdapat kolaborasi Penggunaan Data Terpadu Dengan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Data terpadu disinkronkan dengan data Program Keluarga Harapan (PKH)), hasil sinkronisasi data tersebut dilakukan untuk intervensi penanganan *Stunting* antara lain :

-Belum masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

-Mengkoordinasikan data Anggota rumah tangga / anak yang belum masuk DTKS dengan Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation ( operator siks NG desa) agar dapat dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

-Memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mendapatkan bantuan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan agar masuk sebagai komponen Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam Kecamatan Sawangan untuk mencegah *stunting* dengan paguyuban Gaspol Dulur, dimana Gaspol Dulur ini merupakan suatu keunikan dan intervensi dalam pencegahan *Stunting* yang dilakukan selama 3 bulan, dengan menggunakan anggaran desa, dimana terdapat pola asuh yang mempelajari tentang makan telur, merawat anak *stunting* dengan pola asuh yang benar, melakukan pembinaan dan membiasakan hal yang baik terhadap anak. Dalam Covid 19 ini terdapat jogo Tonggo dimana di Sawangan ini terdapat sedekah Jumat. Angka *Stunting* di Kecamatan Sawangan ini masih tinggi. Pada tahun 2023 mempunyai lokus *stunting* yaitu diantaranya Desa Gondowangi, Podosoko, Sawangan, dan Jati.

Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Bambang, selaku kepala desa Gondowangi yaitu :

*“Dalam mengatasi stunting, Kecamatan Sawangan mempunyai alternatif solusi dalam mencegahnya yaitu dengan gotong sak Ceting, kegiatan Gaspol dulur, sedekah untuk Stunting. Data Stunting tersebut dibantu oleh teman Program Keluarga Harapan untuk masuk dalam data terpadu kesejahteraan masyarakat, dimana untuk kesejahteraan masyarakat ini dilakukan oleh Balai KB, dan dimonitoring oleh teman-teman Program Keluarga Harapan Dalam jaringan sosial Pemerintah Kecamatan Sawangan bekerja sama dengan berbagai sektor seperti aisyiyah, Fatayat, Kantor Urusan Agama, Nahdatul ulama, Forum Anak Magelang, Muhammadiyah, Duta Generasi Berencana, dan masih banyak lagi. Dari sisi pencegahan Stunting masyarakat sudah mulai menanggapi dan responsif terhadap himbauan dari pemerintah untuk mencegah stunting.(Wawancara Bapak B, 53, Kepala Desa Gondowangi).*

Meskipun dalam fakta lapangan masih terdapat masyarakat yang belum mematuhi seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang seharusnya diberikan terhadap anak, malah dikonsumsi oleh orang dewasa. Maka dari itu Pemerintah Kecamatan Sawangan mencoba menciptakan alat monitoring baru untuk memastikan apakah pemberian makanan tambahan ini diberikan terhadap

anak *stunting* atau tidak. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak H yaitu :

*“Dalam melakukan uji coba alat monitoring ini dilakukan di Desa Kapuhan dengan bekerja sama dengan anak Unnes, alat monitoring tersebut juga sudah disampaikan ke bidan desa, pendamping desa, dan melakukan berbagai upaya inovasi. Meskipun alat monitoringnya masih bersifat manual, seperti berupa angket atau kuesioner atau juga blangko. Dilihat dari programnya angka Stunting di Kecamatan Sawangan ini selalu naik, maka dari itu kita memperkuat peran kader di lapangan, masing-masing desa diberi antropometri, meskipun terdapat kendala seperti ada anak yang usil ketika mau diukur.”* (Wawancara Bapak H, 54, Ketua Balai Keluarga Berencana Sawangan).

Dalam mencegah *stunting*, usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu mencari data dan konfirmasi dengan puskesmas, dengan dibantu koordinasi di desa sampai memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) terhadap balita yang *Stunting*, pihak pemerintah desa juga konfirmasi untuk mendampingi calon pengantin agar keturunan yang dilahirkan dapat sehat, pihak pemerintah desa juga memberikan sosialisasi terhadap masyarakat dengan memberikan masukan, gotong-royong, agar dapat memperbaiki dari anak-anak yang dikategorikan *Stunting*, dengan memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) tambahan untuk membantu kaitannya gizi yang terdapat di dalam balita Gondowangi.

Untuk memantau agar pemberian Makanan Tambahan (PMT) ini dapat tepat sasaran yaitu dengan melakukan himbauan, terdapat monitor secara berkala dengan melalui foto atau dokumentasi ketika sang anak mengkonsumsinya. Dari Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah *stunting* yaitu dengan Intervensi spesifik dan sensitif, kalau dari intervensi sensitif dengan Komunikasi Informasi Edukasi Keamanan Pangan (KIE) dan pencegahannya, pendewasaan usia pernikahan, dengan memperhatikan sanitasi, apakah sudah layak atau belum, juga dengan melakukan

pendekatan keluarga berisiko, kalau dari intervensi spesifik dengan Gaspol Dulur, pada tahun 2023 berbagai konvergensi telah dilakukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*, (TPPS)Tingkat Kecamatan sudah saling berkoordinasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nanik Susilowati selaku Kepala Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu :

*“Upaya lain yang dilakukan dengan mekanisme operasional untuk lini lapangan dengan wadahnya mini lokakarya, dengan data itu intervensi apa yang pas, terdapat kampanye pasca persalinan dengan metode kontrasepsi jangka panjang harapannya tidak terlalu dekat. Penyebab Stunting juga lebih condong ke pernikahan dini. Maka dari itu remaja harus memahami tentang kesehatan reproduksi sehingga tidak anemia ketika menikah.”* (Wawancara Bu NS, 50, Kepala Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana).

Dalam fakta di lapangan, ketika melakukan upaya pencegahan *Stunting* masih ditemukan kendala, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nanik Susilowati, selaku Kepala Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kendala yang ditemukan yaitu :

*“Kendala yang ditemukan di lapangan seperti perubahan perilaku dari sasaran, ketika muda tidak mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, adanya perubahan perilaku terhadap masyarakat, intervensinya yang tidak tepat sasaran, maka dari itu harus ada sinkronisasi data. Dalam mencegah stunting ini setiap akhir tahun terdapat evaluasi. Kalau dari persagi E PPGBM range angka 0-11 jika naik maka di range 12-24 juga harus naik, namun jika yang terjadi sebaliknya adalah turun maka harus didampingi. Jika range nya turun maka dipastikan lepas dari pendampingannya. Maka dari itu untuk mencegah stunting diperlukan kerja sama dari berbagai stakeholders seperti dari bank sebagai donatur atau CSR nya, adanya kebijakan jogo Tonggo, adanya sedekah Jumat serta melakukan berbagai inovasi seperti adanya Dashat pendampingan keluarga berisiko 90 hari dan adanya peraturan Jo Kawin Bocah.”*(Wawancara Bu NS, 50, Kepala Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana).

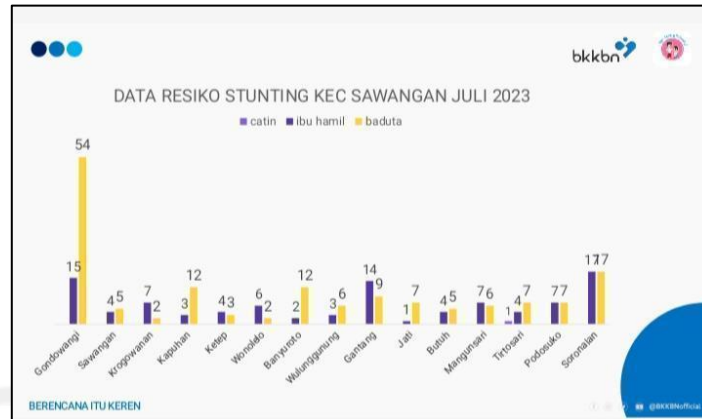
**Tabel 3.3 Data Penganggaran Balai KB Sawangan**

| PENGANGGARAN PENANGANAN STUNTING TINGKAT DESA<br>TA 2023 SE KECAMATAN SAWANGAN |              |                         |                       |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|------------|--|
| NO                                                                             | DESA         | TOTAL PENGANGGARAN      | PENCAIRAN sd SMT 1    | PERSENTASE |  |
| 1                                                                              | GONDOWANGI   | Rp 267.426.000          | Rp 44.788.000         | 17%        |  |
| 2                                                                              | SAWANGAN     | Rp 168.686.000          | Rp 44.937.250         | 27%        |  |
| 3                                                                              | KROGOWANAN   | Rp 164.256.000          | Rp 39.145.000         | 24%        |  |
| 4                                                                              | KAPUHAN      | Rp 376.140.000          | Rp 200.000.000        | 53%        |  |
| 5                                                                              | KETEP        | Rp 346.683.000          | Rp 23.025.000         | 7%         |  |
| 6                                                                              | WONOLELO     | Rp 189.700.000          | Rp 10.250.000         | 5%         |  |
| 7                                                                              | BANYUROTO    | Rp 215.759.500          | Rp 58.790.000         | 27%        |  |
| 8                                                                              | WULUNGUNUNG  | Rp 220.740.000          | Rp 11.908.000         | 5%         |  |
| 9                                                                              | GANTANG      | Rp 52.100.000           |                       | 0%         |  |
| 10                                                                             | JATI         | Rp 66.345.000           | Rp 19.000.000         | 29%        |  |
| 11                                                                             | BUTUH        | Rp 108.010.000          | Rp 13.300.000         | 12%        |  |
| 12                                                                             | MANGUNSARI   | Rp 82.285.500           | Rp 15.300.000         | 19%        |  |
| 13                                                                             | TIRTOSARI    | Rp 131.625.000          | Rp 22.080.100         | 17%        |  |
| 14                                                                             | PODOSOKO     | Rp 212.844.750          | Rp 64.580.100         | 30%        |  |
| 15                                                                             | SORONALAN    | Rp 139.380.000          | Rp 7.500.000          | 5%         |  |
|                                                                                | <b>TOTAL</b> | <b>Rp 2.741.980.750</b> | <b>Rp 574.603.450</b> | <b>21%</b> |  |

**Sumber : Data Penganggaran Balai KB Sawangan**

Berdasarkan data di atas, masing-masing desa mempunyai anggaran yang berbeda dalam pencegahan *Stunting*, semakin besar anggarannya maka jumlah angka *Stunting* di desa tersebut juga semakin besar. Berdasarkan data tersebut dapat kita lihat bahwa untuk penganggaran dana dalam pencegahan *Stunting* di masing-masing desa ini berbeda-beda, tergantung dari jumlah angka *Stunting* yang terdapat di desa. Semakin banyak jumlah angka *Stunting* maka akan semakin besar penganggaran dana yang diberikan oleh pemerintah kecamatan terhadap pemerintah desa.



**Diagram 3.1 Data Resiko *stunting***

Berdasarkan data tersebut, masing-masing desa di Kecamatan Sawangan mempunyai jumlah *Stunting* yang berbeda-beda, menurut data risiko *stunting* Kecamatan Sawangan terbesar yaitu di Desa Gondowangi dan terendah di Desa Ketep.

Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Yati, yang menyatakan bahwa monitoring atau alat angket manual untuk mengetahui *Stunting* diberikan tepat sasaran di dalam menangani anak *stunting* yaitu :

*"Belum ada, belum ada monitoring berupa pembagian kuesioner atau angket. Nutrisi yang diberikan kepada anak untuk mencegah stunting yaitu susu atau telur."*

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat mengedukasi anak *stunting* agar dapat meningkatkan kemampuan motorik yaitu dengan *game* untuk mengedukasi anak atau merangsang monitoring terhadap anak. Adanya *game* edukasi ini dapat memberikan kemajuan terhadap anak daripada tahun tahun sebelumnya.

Mengenai evaluasi atau usulan program pemerintah selanjutnya dari Ibu Yati sendiri belum ada.

Agar Air Susu Ibu ( ASI) terhadap anak naik atau bagus yaitu dengan :

*"Minum asi, makan dengan memperhatikan jadwal makan. Anak saya ini tidak ada makanan yang dialergikan. Di umur segitu sedang aktif aktifnya, cara*

*saya mengedukasinya yaitu dengan mainan tts, lagu anak anak yang mengedukasi.”*

Untuk mencegah *stunting*, Pemerintah Kecamatan Sawangan juga bekerja sama dengan 19 Kementerian dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat. Sebagai bentuk perhatian dari pemerintah, kemarin pada Bulan September dilaksanakan sosialisasi di Desa Gondowangi karena Desa Gondowangi merupakan desa locus *Stunting*. Berbagai pihak dan *stakeholders* juga disertakan dalam mencegah *stunting*, seperti organisasi masyarakat (ormas), Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), dan mahasiswa. Dalam pencegahan *Stunting*, mahasiswa turut serta dalam memberikan sosialisasi terhadap orang tua yang anaknya mengalami *stunting*. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Ibu Yati, beliau berkata bahwa :

*"Ketika saya menikah tidak ada pembekalan catin di KUA."*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Heru pada hari Senin, 18 Desember 2023, upaya yang sudah dilakukan untuk mencegah *stunting* yaitu dengan :

*"Kami mencegah mengadakan Minilokakarya setiap bulan sekali, dengan mengupayakan seperti Kantor Urusan Agama melakukan pembekalan terhadap catin, dimana di catin ada tim pendamping keluarga, penanaman, dan mempersiapkan ketika akan menjadi orang tua, itu jadwalnya setiap hari Rabu ada. Untuk anak yang mempunyai kelainan jantung nanti dirujuk ke instansi kesehatan, Stunting yang biasanya ada penyakit penyerta nanti dirujuk ke puskesmas, menangani ke yang lebih tinggi, misalnya ke rumah sakit. Saya rasa ya seperti itu, kita penanganan dari puskesmas, dan dari preventif, pemberian tablet tambah darah, lebih banyak dari desa, perguruan tinggi secara langsung untuk memberikan bantuan dan lebih banyak lintas sektor dalam pencegahan Stunting. Dari perguruan tinggi membantunya lebih banyak ke nontunai, memberikannya berupa uang, kemudian diserahkan ke pengelola desa untuk dibelanjakan, sampai saat ini Stunting masih ke tinggi badan yang kurang,*

*melihat dari perkembangan yang lain, tapi itu juga dari pola makan, pola asuh, makanya dari setiap kegiatan ada evaluasi dan pemerintah sudah mengupayakan memberi bantuan terhadap ibu hamil, dari posyandu sudah ada pemberian makanan tambahan, ada tablet tambah darah, ibu ibu yang anaknya Stunting dikasi pola asuh dan pola makan, jadi ibu ibu kita bekal. Baik yang Stunting atau tidak Stunting mereka sudah dibekali dengan pengetahuan itu dari sejak mulai catin, sejak mulai kehamilan, sosialisasi dengan melalui posyandu, dengan pertemuan lewat balita, pertemuan itu bagi ibu semua anak, baik yang Stunting ataupun yang tidak Stunting."*

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak H, kendala dalam memberikan *Stunting* yaitu Bapak Heru tidak mempunyai tolak ukur setelah diberikan, penyuluhan itu apakah mudeng atau tidak, kemudian dikasih tau diberikan pengenalan agar semua mudeng, tapi paling enggak kita sudah berupaya sosialisasi ke sasaran. Rencana ke depannya akan membentuk orang tua asuh bagi anak yang *Stunting*, Sudah deal membuat orang tua asuh, mengenai kerja sama dengan berbagai *stakeholder* sudah berjalan selama dua tahun, ke Baznas sudah masuk, Fatayat, Muhammadiyah, muslimat, sudah kita gandeng, semua lintas sektor kita gandeng, dan monitoring yang di Kapuhan sudah berjalan, dari mahasiswa Unnes, dan masyarakat juga bersifat responsif. Setiap hari mereka mengisi manual dengan angket dan mengirim foto. Yang menyerahkan adalah kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), memberikan uang, kemudian dibelanjakan. Acara di gondowangi, merupakan *lokus stunting*, jadi ada 19 kementerian turut serta.

Kemudian *stakeholders* lainnya yang berupaya untuk mencegah *stunting* adalah dari pihak Sekretaris Kecamatan, yang menyatakan bahwa :

*"Kecamatan Sawangan itu salah satu kecamatan yang memelopori data dan kecamatan yang melakukan integrasi data. Terdapat peta helix di dalam mencegah stunting, sehingga dalam mencegah stunting ini melibatkan dari berbagai sektor, terdapat Minilokakarya yang dilakukan setiap 1 bulan sekali."*

Ibu Retno juga menyatakan bahwa :

*“Kecamatan Sawangan itu salah satu kecamatan yang mempelopori data dan kecamatan yang melakukan integrasi data. Terdapat peta helic di dalam mencegah stunting, sehingga dalam mencegah stunting ini melibatkan dari berbagai sektor, terdapat Minilokakarya yang dilakukan setiap 1 bulan sekali.”*

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Ibu Retno membenarkan bahwa masih terdapat permasalahan yang salah sasaran dalam memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) terhadap anak. Masih terdapat orang tua yang turut serta mengkonsumsi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang seharusnya hanya dikonsumsi oleh anak. Untuk menghadapi permasalahan tersebut Ibu Retno menyatakan bahwa upaya yang dilaksanakannya adalah melakukan pendekatan, orang tua dari anak yang terkena *Stunting* diberikan sosialisasi atau pengertian bahwa anak sangat membutuhkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) agar dapat meningkatkan nutrisinya. Pemberian sosialisasi ini juga dilakukan melalui posyandu di antara kader dengan orang tua. Pemahaman atau sosialisasi dilakukan terhadap ibu-ibu. Evaluasi juga dilakukan setiap bulan dengan bertemu dinas terkait, ada Keluarga Berencana (KB), Kantor Urusan Agama (KUA), dan setiap 1 bulan sekali terdapat kegiatan mengumpulkan perangkat desa dan dinas terkait. Inovasi yang dilakukan Kecamatan Sawangan untuk mencegah *stunting* yaitu "*Gotong Sak Ceting*" yang mempunyai arti gotong-royong untuk mencegah *stunting*. Untuk peraturan, Pemerintah Kecamatan Sawangan mengikuti kebijakan dari Kabupaten Magelang atau dari Provinsi Jawa Tengah ataupun mengikuti peraturan dari pusat.

Meskipun dalam lapangannya masih ditemukan permasalahan seperti banyaknya pernikahan dini yang terjadi daerah dataran tinggi, kemudian dari Ibu Retno selaku sekretaris kecamatan mempunyai solusi yaitu untuk memberikan sosialisasi terhadap masyarakat, dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan bahayanya pernikahan dini. Selain itu, maraknya juga didukung dengan adanya izin dari Pengadilan Agama yang mengizinkan anak di bawah

umur untuk melakukan pernikahan dengan memberikan surat izin dispensasi nikah. Dalam mencegah *stunting* ini diantara berbagai *stakeholders* lebih bersifat fungsional, karena tidak memandang posisi atau kedudukan yang penting adalah kinerja dan fungsi untuk mencegah *stunting*, sehingga antar masing-masing *stakeholders* menjalankan tugas dan wewenangnya secara fungsional. Serta untuk menghadapi anak yang memang *Stunting* yang disebabkan karena kelainan sejak lahir adalah adanya pendampingan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk menangani yang disabilitas.

Tanpa adanya dukungan dari masyarakat, upaya untuk mencegah *stunting* ini tidak akan berjalan dengan lancar. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara terhadap Ibu Indah, selaku orang tua dari anak yang mengalami *Stunting*, menurutnya untuk mencegah *stunting* dilakukan upaya yang sangat maksimal, yaitu :

*“Untuk mencegah stunting, peran yang dilakukan pemerintah sudah maksimal, dalam pencegahan Stunting terdapat sosialisasi pola makan dan pola asuh, untuk anak nya sendiri lebih menyukai nasi dengan telur, ayam, dan untuk sayur anaknya tidak suka. Menurutnya lembaga yang turut membantu dalam mencegah stunting yaitu dari desa dan dinas sosial. Harapan untuk kebijakan pemerintah yaitu mempertahankan dan melanjutkan program yang sudah bagus. Untuk pelayanan kader juga sudah sangat baik. Untuk sejauh ini, alat monitoring nya berupa mengirimkan foto di grup, ibu indah menyatakan bahwa anaknya menyukai chiki-chiki, dia makannya dikit-dikit tapi banyak. Padahal dari himbauan kader tidak boleh memakan chiki-chiki, anaknya sudah berusia 3 tahun dan pertumbuhannya juga tidak kalah dari teman-temannya”*

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bu Siti, *Stunting* di Desa Gondowangi ini mengalami peningkatan, maka dari itu Ibu Siti bersinergi untuk menurunkan *Stunting* dengan mengomando kader agar dapat memberikan sosialisasi terhadap masyarakat atau orang tua yang anaknya *Stunting*, pemerintah desa berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan sawangan dan kabupaten

Magelang dengan memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) terhadap balita *Stunting* selama satu Minggu sekali. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) tersebut berupa makanan mentah yang nanti diolah oleh orang tua anak, namun di dalam praktiknya masih terdapat kendala dimana Pemberian Makanan Tambahan (PMT) tersebut tidak diberikan secara tepat sasaran terhadap anak, namun anggota keluarga yang lainnya turut serta mengkonsumsi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang seharusnya hanya diberikan terhadap anak yang *Stunting*. Maka dari itu terdapat rencana mengatasi masalah tersebut yaitu dengan adanya dokumentasi ketika anak tersebut makan yang telah diolah. Untuk bagi balita yang *Stunting* dan mengalami kelainan jantung ini terdapat pendampingan Tim Terpadu Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dari pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas). Masih ditemukan permasalahan yaitu orang tua yang malu dan tidak mengakui jika anaknya mengalami *stunting*. Maka dari itu solusi yang dilakukan adalah memberikan pengertian dan sosialisasi terhadap para orang tua yang anaknya *Stunting* agar bisa menerima. Bu lurah menghimbau terhadap para kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) agar memberikan pengertian secara pelan-pelan terhadap orang tua yang anaknya *Stunting* agar mereka dapat memberikan nutrisi yang lebih baik anaknya. Kendala lainnya adalah timbangan yang ada di posyandu dengan timbangan yang ada di pusat Kesehatan Masyarakat ternyata berbeda sehingga hasil pengukuran menjadi kurang relevan, selain itu kendala lainnya adalah ketika diukur banyak anak yang ketakutan sehingga mereka menangis dan hasil pengukuran pun kurang maksimal, maka dari solusi yang ditawarkan adalah kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) turut menangani anak dan membantu orang tua untuk mengkondisikan anak agar mereka mau untuk diukur.

*“Mengenai pola asuh dan pola makan, juga menganggarkan, dari PKK langsung ke desa, untuk balita ini kita wacanakan dari orang tua ke desa dan tidak boleh diwakilkan, pola asuh kan orang tuanya. Untuk anggaran desa itu berbeda dari desa yang satu dengan desa yang lain. Gondowangi locus Stunting*



*sehingga lebih banyak, semakin desa itu jumlah anggarannya sedikit maka akan semakin kecil, untuk sejauh ini kader memberi sosialisasi ini semua orang tua responsif dan bagus. Alhamdulillah dari balita dan ibu hamil diperhatikan. Stunting dicegah tidak dari balita aja, tapi dari saat hamil, untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dengan diberikan PMT, ibu hamil PMT nya juga sama, ada pembekalan dari catin, pembekalan dari catin ada arahan dan sosialisasi, Gondowangi pertama yang membuat ini, diacungi jempol oleh pak camat dan ditularkan di desa lain. Untuk data Stunting dibawa oleh bidan, Untuk pengecekan data Stunting semua bidan turut serta, evaluasinya untuk penanganan stunting berkaitan dengan PMT kita sudah meningkat, ini sudah maksimal dan bagus sekali. juga untuk kedepannya masih ada yang diprioritaskan yang hamil biar nanti nutrisi saat hamil baik, dari ibu mengamati semua proses. Dari pemerintah upayanya sudah maksimal. Sawangan inovasinya gotong sak ceting, pak camat yang memberikan nama, sawangan mempunyai inovasi, dari si anak yang Stunting, dan balita gemilang lebih bagus dan dipertahankan.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sawangan, yaitu Bapak Ikhwan, terdapat kendala dalam mencegah *stunting* adanya catin yang berkendala hadir dalam menghadiri pembekalan calon pengantin (catin) dengan alasan bekerja.

*“Ada beberapa catin yang menikah di bawah umur dengan pengertian karena perkawinan itu paling tidak ya 21 tahun baik catin laki laki maupun catin perempuan, kalau kurang dari 21 tahun nanti ijinnya ijin orang tua, kalau kurang dari 19 tahun itu atas dispensasi dari pengadilan agama. Ya walaupun ada secara prosedur pasti kita laksanakan, itu mereka mendaftar di KUA, kita tolak pendaftarannya, kemudian catin punya 2 pilihan, yang pertama meneruskan pernikahannya konsekuensinya harus mengurus dispensasi di pengadilan agama, atau menunda untuk umur yang mencukupi.”*

Masih ditemukan banyak orang yang mengajukan dispensasi nikah, Rata-rata meneruskan karena mereka yang mendaftar bisa jadi sudah merencanakan

rencana pernikahan, mengajukan Dispensasi ke pengadilan agama. Masih banyak menemukan siswa yang berumur 15-17 yang melakukan pernikahan.

*“Ya kalau mereka kurang dari 19 tahun karena mereka mengajukan kita tolak dan diterima oleh pengadilan ya nanti kita laksanakan. Misalnya ada catin yang seperti itu berisiko melahirkan anak stunting. kalau berisiko iya. Di samping pengadilan agama juga ada rekomendasi dari dinas sosial untuk merekomendasi bahwa anak itu atau catin itu, ya risikonya jelas pasti di bawah umur 19 tahun kan pasti berisiko, kalau risiko secara data di awal yang kita sampaikan ada di dinas kesehatan, puskesmas ataupun plkb, apakah selama tahun 2023 ini KUA pernah mengadakan sosialisasi atau seminar terhadap catin atau kepada masyarakat sekitar yang bekerja sama dengan plkb atau dinsos, tentang bahayanya pernikahan dini, akan berisiko melahirkan anak stunting itu. Kalau kepada Stunting nya kita justru bekerja sama dengan catin yang setiap Rabu itu kita undang, kalau untuk pencegahan ya sekali waktu KUA diundang, berkaitan program di KB, dan melakukan penyuluhan di sekolah sekolah, misal dari Kua juga melakukan pencegahan risiko Stunting terhadap catin, melibatkan pencegahan perkawinan anak, kita bekerja sama dengan desa, dengan puskesmas, kalau untuk pencegahan, KUA diundang dan inisiatif dari kua dan sosialisasi agar mencegah perkawinan anak di desa Mangunsari, dari kepolisian, dari puskesmas.”*

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Ikhwan, terdapat *petha helic* dalam mencegah *stunting*, dimana semua *stakeholder* turut serta dalam mencegah *stunting*, berdasarkan hasil wawancara terhadap Ibu Retno terdapat rapat yang diadakan selama sebulan sekali. Tugas dari aisyiyah dalam mencegah *stunting* yaitu di setiap pertemuan terdapat infaq, kegiatan infaq ini untuk membantu dalam mencegah *stunting*. Memperkuat pemahaman orang tua yang anaknya *Stunting* dengan memberikan sosialisasi baik dari puskesmas dan desa-desa. Peran dari aisyiyah untuk mencegah *stunting* adalah mengisi materi atau memberikan

pembekalan materi terhadap calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) di hari Rabu Minggu 4.

Kemudian dari narasumber selanjutnya yaitu dari GenRe atau yang dikenal dengan “Generasi Berencana”, dalam mencegah *stunting* ini Generasi Berencana (GenRe) juga turut berupaya. Usaha yang telah dilakukannya dalam mencegah *stunting* ini lebih terhadap sosialisasi dan *talkshow*, dalam melakukan sosialisasi, sasarannya yaitu sekolah, remaja, selain itu sasaran dalam sosialisasi juga terhadap remaja dan sekolah yang berada di desa dan kecamatan dengan tujuan agar mereka dapat lebih tahu tentang bahaya dari kenakalan remaja dan pernikahan dini. Kendala dalam mencegah *stunting* yaitu terdapat audiensi yang antusias dan ada yang tidak antusias, Generasi Berencana (GenRe) ini juga mempunyai program yang bernama "Genting" adalah Gerakan Untuk mencegah *stunting*. Dalam program "Genting" ini juga terdapat adanya kegiatan dalam mencegah anemia dan *Stunting*, dimana di bulan ini terdapat 4 kali dalam melakukan sosialisasi, untuk perempuan diberikan tablet tambah darah dan laki-laki diberikan pemahaman atau sosialisasi tentang bahayanya seks bebas, bahaya nikah dini. Upaya lain yang dilakukan oleh Generasi Berencana (GenRe) adalah memberikan pemahaman tentang cara mengasuh anak yang baik, memberikan edukasi tentang Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI), terdapat Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan sebagai pendidik sebaya dan konselor sebaya, terdapat rapat internal yang dilakukan oleh Generasi Berencana (GenRe). Pemerintah juga mempunyai program "Jo Kawin Bocah" yang berisikan program yang ditujukan terhadap anak dan remaja agar mereka bersekolah dan menuntut ilmu yang tinggi sehingga dapat meminimalisir jumlah angka pernikahan dini.

## B. Pembahasan

### 1. Analisis Teori Jaringan Sosial yang Dibentuk Pemerintah Kecamatan Sawangan

Pemerintah Kecamatan merupakan aktor utama dalam upaya pencegahan *Stunting*. Hal tersebut dibuktikan dengan upaya yang telah dilakukan pemerintah kecamatan sawangan dalam upaya mencegah *stunting*, salah satunya dengan membentuk jaringan sosial. M.Z. Lawang dalam (Damsar, 2009) yang menyatakan bahwa jaringan sosial adalah ikatan yang terjalin antar individu atau kelompok melalui hubungan sosial yang terjalin diantara mereka. Dalam ikatan jaringan sosial tersebut mereka membentuk kerja sama antara satu sama lainnya. Dalam lingkup Pemerintah Kecamatan Sawangan terdapat beberapa jaringan sosial yang sudah dibentuk dan saling berhubungan antara satu sama lainnya. Hubungan tersebut seperti hubungan pemerintah Kecamatan Sawangan dengan pemerintah Kabupaten Magelang, Pemerintah Kecamatan Sawangan dengan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Sawangan, Pemerintah Kecamatan Sawangan dengan masyarakat Kecamatan Sawangan, pemerintah Kecamatan Sawangan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawangan, Pemerintah Kecamatan Sawangan dengan Aisyiyah Kecamatan Sawangan, Pemerintah Kecamatan Sawangan dengan Duta Generasi Berencana (GenRe) Kecamatan Sawangan, dan Pemerintah Kecamatan Sawangan dengan Desa maupun Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) setempat.

Dalam hal ini jaringan sosial mempunyai peran di dalam mengupayakan pencegahan *Stunting* terutama di Kecamatan Sawangan, hubungan yang terjalin diantara mereka sebagai sebuah upaya meminimalisir jumlah angka *Stunting* di Kecamatan Sawangan.

#### a. Klasifikasi Jaringan Sosial

Menurut (Damsar, 2009) jaringan sosial diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan, yaitu mikro, meso, dan makro. Berhubungan dengan klasifikasi

tersebut, setelah melakukan penelitian lapangan hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan sosial di dalam mencegah *stunting* diklasifikasikan sebagai berikut :

#### 1) Jaringan Mikro

Jaringan mikro merupakan jaringan yang terjalin antar individu. Jaringan ini diawali dengan interaksi personal diantara individu dan menjadi interaksi sosial atau hubungan sosial. Berkaitan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa jaringan mikro di dalam upaya Kecamatan Sawangan dalam mencegah *stunting* dibuktikan dengan pernyataan sekretaris kecamatan sawangan yang menyatakan bahwa hubungan awal mitra kerja sama antara sekretaris Kecamatan Sawangan dan kepala Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Sawangan diawali dengan hubungan personal yang terjalin. Hubungan keduanya berlanjut hingga membentuk jaringan sosial yang baru. Dengan adanya hubungan tersebut, sekretaris Kecamatan Sawangan saling berkoordinasi tentang informasi dengan ketua Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Sawangan yang dapat menghubungkan informasi dengan dinas terkait atau pihak lainnya. Hubungan dengan pihak luar dibentuk dan dilakukan untuk membantu dalam meminimalisir jumlah angka *Stunting* di Kecamatan Sawangan. Informasi yang diperoleh melalui hubungan tersebut menjembatani hubungan yang lebih besar di dalamnya. Hal ini sangat sesuai dengan salah satu fungsi jaringan sosial mikro yang diungkapkan Damsar. Damsar ini menyatakan bahwa di dalam hubungan mikro terdapat fungsi jaringan sebagai jembatan, dimana dapat mempermudah hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Hubungan ini dapat membentuk pola jaringan sosial yang baru (Damsar, 2009). Berdasarkan penjelasan diatas terkait teori jaringan mikro dan fakta di

lapangan, terdapat beberapa jaringan sosial dalam upaya mencegah *Stunting*.

#### Norma Sosial

Dari fatayat juga membantu dalam pencegahan *stunting* di Kecamatan Sawangan yaitu membantu pemberian tablet tambah darah, memberikan sosialisasi terhadap ibu-ibu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan memberikan sosialisasi terhadap lingkungan di sekitarnya. Dari Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) juga turut serta dalam pencegahan *stunting* yaitu dengan memberikan sosialisasi terhadap kader dan ibu-ibu yang anaknya *stunting* agar lebih memperhatikan gizi terhadap anak. Berdasarkan penjelasan diatas, terkait teori jaringan mikro dan fakta di lapangan, dapat disimpulkan bahwa beberapa jaringan sosial dalam pencegahan *stunting* dapat dikategorikan dalam jaringan mikro. Salah satunya adalah hubungan baik diantara berbagai stakeholder dalam menumbuhkan pola jaringan sosial yang berlanjut pada hubungan kerja sama yang lebih luas. Hal tersebut selaras dengan penelitian (Putri, 2018) yang menyatakan bahwa jaringan sosial mikro dapat terbentuk dari hubungan yang baik diantara berbagai stakeholder. Hal ini juga dibuktikan dengan hubungan personel pemerintah kecamatan sawangan dengan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Sawangan.

#### 2) Jaringan Meso

Jaringan Meso adalah jaringan yang di dalamnya terdapat beberapa aktor yang berhubungan satu sama lain. Aktor di dalamnya saling berinteraksi di dalam suatu konteks sosial dan biasanya terbentuk menjadi suatu kelompok (Damsar, 2009). Berhubungan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat jaringan sosial Meso di dalam upaya mencegah *stunting*. Pemerintah Kecamatan Sawangan



merupakan jaringan sosial Meso yang menghimpun berbagai pemerintah desa dan instansi di bawah Pemerintah Kecamatan Sawangan seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan masih banyak lagi.

Dalam paguyuban tersebut terdapat berbagai kelompok atau stakeholder yang memiliki tujuan yang sama untuk upaya mencegah *stunting*. Dengan dibentuknya paguyuban ini anggota yang terlibat di dalamnya mempunyai peran dan tujuan yang sama dalam upaya mencegah *stunting* di Kecamatan Sawangan ini. Fakta di lapangan selaras dengan pendapat Damsar yang menyatakan bahwa dalam jaringan sosial Meso terdapat fungsi pelicin, maksudnya adalah kemudahan bagi setiap anggota kelompok di dalam mengakses sumber daya langka ataupun barang. Dengan melalui paguyuban, informasi dari luar akan mudah disampaikan sehingga terjadi kemudahan koordinasi di dalam upaya pencegahan *stunting*. Fakta di lapangan juga selaras dengan pendapat dari Damsar yang menyatakan bahwa terdapat fungsi jembatan dalam jaringan Meso. Maksud dari fungsi jembatan adalah setiap anggota akan menyampaikan informasi satu dengan lainnya agar tujuan utama untuk meminimalisir angka *stunting* ini dapat tercapai. Fungsi jembatan juga dapat membentuk pola jaringan baru, seperti fakta di lapangan yang mengupayakan dalam mencegah *stunting*. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal memperkuat jaringan sosial masing-masing stakeholder melakukan rapat secara rutin selama kurang lebih 1 bulan sekali untuk memperkuat ikatan jaringan dan mewujudkan kelembagaan. Dalam upaya mencegah *stunting*, terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai stakeholder baik preventif maupun setelah kejadian. Hal tersebut selaras dengan penjelasan tentang jaringan Meso, dimana di dalam jaringan tersebut terdapat

beberapa aktor yang saling berhubungan satu sama lain. Dimana di dalam sebuah kelembagaan setiap anggota berhubungan satu dengan lainnya dalam menjalankan roda kelembagaan tersebut.

### 3) Jaringan makro

Jaringan makro adalah hubungan yang terdiri dari beberapa kelompok yang terlibat di dalamnya. Dalam kelompok tersebut terajut dalam satu ikatan yang saling berhubungan. Kelompok yang dimaksud disini adalah institusi, negara, atau organisasi. Dalam jaringan makro menghubungkan institusi dan kelompok yang terlibat dalam melakukan upaya mencegah *stunting*. Kelompok dan institusi yang terlibat di dalam jaringan ini adalah paguyuban, pemerintah desa, dinas terkait, Kantor Urusan Agama (KUA), Aisyiyah, dan Generasi Berencana (GenRe). Kelompok dan institusi tersebut saling berhubungan satu sama lain, hubungan mereka terjalin karena terdapat kelompok yang menjembatani antara mereka.

## 2. Analisis Teori Jaringan Sosial Mark Granovetter terhadap Jaringan Sosial Pemerintah Kecamatan Sawangan dalam Upaya Mencegah Stunting

Sehubungan dengan hal tersebut, klasifikasi diantara berbagai pihak dapat berjalan dengan maksimal apabila memenuhi empat prinsip gagasan mengenai pengaruh jaringan sosial dalam upaya mencegah *stunting*. Empat prinsip tersebut adalah gagasan yang diungkapkan oleh Marx Granovetter. Prinsip tersebut dijelaskan sebagai berikut :

### a. Norma dan Kepadatan Jaringan

Granovetter mendefinisikan norma sebagai ide bersama yang berhubungan dengan tata cara yang tepat di dalam berperilaku dan bertindak, norma ini digunakan oleh individu dalam menentukan tindakan mereka, norma yang berkembang tersebut akan mengikat elemen yang ada

di dalamnya. Jaringan sosial padat merupakan koneksi diantara individu yang banyak, koneksi tersebut terjalin diantara kelompok atau individu. Adanya keterlibatan banyak aktor membuat informasi dapat diterima atau disampaikan secara beragam. Informasi yang terdapat di dalam jaringan baru ini akan menyebabkan terjadinya inovasi baru.

Dari penjelasan tersebut, kaitannya dengan jaringan sosial yang dibentuk oleh pemerintah Kecamatan Sawangan dalam upaya penurunan jumlah *stunting* terdapat beberapa norma yang telah dibentuk di dalam jaringan sosial tersebut. Yang pertama berkaitan dengan jaringan sosial dalam berbagai stakeholder untuk mencegah *stunting*, seperti dalam organisasi kelembagaan umumnya, dalam pencegahan *stunting* ini telah disepakati norma bersama. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam pencegahan *stunting* ini, Pemerintah Kecamatan Sawangan dengan berbagai lintas sektor terdapat aturan atau norma yang dibentuk, baik dari sisi pola asuh maupun pola makan terhadap anak. Pola makan terhadap anak, diberikan makanan bernutrisi, satu hari mengkonsumsi satu telur, diberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), rajin memakan makanan sehat dan bergizi, anak juga dilarang untuk memakan chiki-chiki atau makanan ringan. Norma yang dibentuk juga diikuti dengan sanksi.

Dalam keberjalanan mencegah *stunting* ini, masih banyak ditemukan orang tua yang tidak terima jika anaknya *stunting*, selain itu masih ditemukan permasalahan lainnya seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang seharusnya diberikan terhadap anak tapi malah dikonsumsi secara bersama-sama oleh seluruh anggota keluarganya. Selain masalah tersebut, masih ditemukan masalah lainnya yaitu orang tua dari anak yang *stunting* tidak mau mengambil Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dengan alasan gengsi, dengan menyuruh tetangga atau saudaranya untuk mengambil Pemberian Makanan Tambahan (PMT) tersebut di Balai desa. Meskipun tidak ada sanksi tertulis, namun terdapat sanksi sosial yang

biasanya dirasakan oleh anggota yang kurang taat. Lama-kelamaan anggota yang tidak menjalankan norma tersebut akan kembali menjalankan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa anggota masyarakat yang keberatan dengan aturan atau norma yang ada, sehingga tidak menjalankan norma dengan semestinya. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat ditarik di dalam teori yang diungkapkan oleh Marx Granovetter tentang kepadatan jaringan dan norma. Norma ditegakkan dengan baik di dalam jaringan sosial dimana menunjukkan norma yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa di dalam Pemerintah Kecamatan Sawangan masih terdapat orang tua dari anak yang *stunting* yang keberatan dengan aturan yang ada atau norma sehingga orang tua dari anak yang *stunting* tidak menjalankan norma sebagai mestinya. Dari permasalahan tersebut, dapat ditarik di dalam teori yang diungkapkan oleh Marx Granovetter tentang kepadatan jaringan dan norma. Adanya kepadatan jaringan yang padat dapat menimbulkan kekeluargaan yang kuat.

Yang kedua adalah hubungan jaringan sosial antara pemerintah kecamatan sawangan dengan berbagai stakeholder seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Aisyiyah, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Generasi Berencana (GenRe), pemerintah desa, dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Hubungan mitra dan dan kerja sama ini dijumpai oleh Pemerintah Kecamatan, oleh sebab itu pemerintah kecamatan terlibat di dalam jaringan sosial. Dari stakeholder tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mencegah *stunting*. Tujuan pemerintah Kecamatan Sawangan menjalin relasi jaringan dengan berbagai lintas sektor adalah dapat meminimalisir jumlah angka *stunting* di Kecamatan Sawangan. Adanya partisipasi dan dukungan dari berbagai stakeholder dengan memberi sokongan bantuan berupa nontunai, adanya sosialisasi dan *workshop* tentang upaya mencegah *stunting* terhadap orang

tua yang anaknya *stunting*. Dalam menjalin relasi hubungan kerja sama ini tidak ada aturan atau norma yang mengikat antara pemerintah Kecamatan Sawangan dengan berbagai stakeholder, namun masing-masing stakeholder telah memiliki kesadaran kolektif untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Sawangan menyatakan bahwa aturan yang harus dilakukan dan dijalankan adalah harus aktif di dalam asosiasi, aktif mengikuti rapat setiap bulan, turut serta andil dalam proses pencegahan *stunting*. Dengan anggaran dana dan rencana yang telah dibahas dan disusun, diharapkan berbagai stakeholder dapat bertanggung jawab melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan. Hal tersebut wajib dijalankan oleh seluruh stakeholder dengan harapan bahwa dapat mengikuti dan menjalankan segala peraturan seperti aktif dan rutin mengikuti rapat bulanan, dan jika mereka tidak menjalankan dengan baik, maka akan menerima sanksi.

Berdasarkan hasil wawancara sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan Sawangan terhadap stakeholder yang tidak menjalankan tugas dengan baik adalah berupa sanksi teguran. Diharapkan teguran tersebut dapat membentuk karakter masing-masing stakeholder untuk loyalitas dan bertanggung jawab. Norma dan aturan ini dibentuk adalah upaya agar hubungan jaringan antara stakeholder berjalan secara terarah dan baik. Ketiga adalah hubungan jaringan sosial antara pemerintah Kecamatan Sawangan dengan dinas terkait. Hubungan kerja sama dinas terkait dengan pemerintah kecamatan sawangan melibatkan hubungan dengan pihak lain seperti masyarakat. Gaspol dulur dan Dapur Sehat Atasi *Stunting* (Dashat) sebagai bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Sawangan dengan berbagai stakeholder dalam upaya mencegah *stunting*.

Gaspol dulur ini dengan memberikan telur setiap hari dan adanya program "Jo Kawin Bocah" yaitu bentuk larangan terhadap anak untuk menikah dini. Dari hasil wawancara terhadap sekretaris Kecamatan Sawangan yang menyatakan bahwa pemerintah Kecamatan Sawangan merupakan pintu pertama pihak luar sebelum menjalin relasi kerja sama dengan masyarakat. Pemerintah kecamatan dan dinas terkait menjadi 2 lembaga resmi pemerintah yang saling mendukung satu sama lain mengenai program kerja dari pemerintah pusat. Dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Sawangan mempunyai rencana untuk meminimalisir jumlah angka *stunting* di Kecamatan Sawangan, namun Pemerintah Kecamatan Sawangan tidak bisa sendiri sehingga perlu mendapatkan dukungan dan binaan dari lembaga pemerintah lain yang lebih menjurus terhadap apa yang ditujukan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kecamatan Sawangan mengadakan relasi jaringan sosial dengan dinas terkait di dalam upaya pencegahan *stunting*. Dalam menjalin interaksi hubungan dengan dinas terkait tidak ada norma ataupun peraturan di dalamnya. Dinas memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan program mereka yang disesuaikan dengan kebutuhannya.

Dinas memberikan dorongan bantuan berupa sosialisasi, pengarahan, dan pelatihan. Dinas juga melakukan hubungan kedekatan personal terhadap berbagai stakeholders untuk mengetahui progres dalam upaya pencegahan *stunting*. Jadi hubungan yang terjalin di antara pihak-pihak tersebut membentuk norma dan jaringan. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya norma di dalam sebuah jaringan dibentuk secara sengaja dan aturan yang harus ditaati oleh aktor di dalam jaringan tersebut. Hal tersebut tidak selaras dengan penelitian (Ditomayoza & Yanti, 2018) yang menjelaskan bahwa di dalam penelitian mereka norma terbentuk karena 2 hal yaitu secara sengaja untuk mengatur jaringan sosial dan secara tidak sengaja yang berkembang seiring berjalannya waktu. Dalam jaringan Pemerintah Kecamatan Sawangan masih terdapat beberapa pola jaringan



sosial yang tidak menjalankan norma yang ada secara maksimal oleh beberapa aktor karena berbagai alasan. Dari penelitian ini, menunjukkan bahwa norma akan ditegakkan dalam kepadatan jaringan yang tinggi yang melibatkan berbagai aktor di dalamnya.

Sementara norma tidak akan berjalan maksimal apabila diterapkan dalam kepadatan jaringan sosial rendah. Dalam mengukur kelanggengan jaringan sosial tidak harus dilihat dari norma atau aturan yang terdapat jaringan sosial tersebut, akan tetapi tanggung jawab dan kepercayaan setiap aktor di dalam menjalankan peran dan tugas dalam hubungan jaringan sosial.

b. Kekuatan Ikatan lemah

Kekuatan ikatan lemah adalah ikatan yang terjalin diantara individu yang tidak saling berdekatan atau di dalam satu lingkup yang sama. Granovetter berpendapat ikatan lemah memberikan difusi informasi yang lebih cepat dan kompleks daripada ikatan yang kuat (Granovetter, 1983). Sementara ikatan yang kuat cenderung berasal dari hubungan kedekatan yang intim seperti teman dekat dan keluarga sehubungan hubungan diantara mereka mempunyai pergerakan dalam satu lingkup yang sama. Ikatan kuat ini terbentuk diawali dengan adanya tujuan yang sama anggota-anggota atau stakeholders dalam mencegah *stunting*. Tujuan yang sama tersebut akan melebur membentuk ikatan yang kuat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan berbagai stakeholder untuk mencegah *stunting* seperti Kantor Urusan Agama (KUA), pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas), Aisyiyah, Pemerintah Kecamatan Sawangan, Generasi Berencana (GenRe), masyarakat, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan pemerintah desa.

Hubungan jaringan sosial diantara berbagai stakeholders tersebut saling berikatan kuat. Apabila salah satu anggota dari stakeholders tersebut

mendapatkan informasi yang berkaitan dengan upaya atau strategi dalam mencegah *stunting*. Informasi tersebut mempunyai pengaruh penting untuk mendorong seluruh stakeholders untuk saling berpartisipasi dan berkontribusi secara aktif dalam mencegah *stunting*. Dapat disimpulkan bahwa hubungan jaringan sosial di dalam asosiasi untuk mencegah *stunting* tergolong kuat. Adanya keanggotaan yang banyak di dalam paguyuban membuat mereka saling tukar menukar informasi dari apa yang mereka dari luar paguyuban.

Menurut Granovetter, sangat penting "lubang struktural", di dalam sebuah ikatan tidak hanya dilihat dari kualitas ikatan tersebut terbentuk dalam kelompok, usaha yang dilakukan untuk membangun jaringan sosial. Dalam membangun jaringan sosial tentunya dibutuhkan keterlibatan individu dan pihak lain.

Dalam jaringan sosial dalam mencegah dan meminimalisir angka *stunting* terdapat beberapa aktor yang terlibat seperti pemerintah Kecamatan Sawangan, dinas terkait seperti dinas sosial Kabupaten Magelang, Dinas Kesehatan, dan Pemerintah desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Aisyiyah, generasi berencana (GenRe), Program Keluarga Harapan (PKH), Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Sawangan, dan masih banyak stakeholder lainnya.

Hal ini dapat ditarik dalam teori yang disampaikan Granovetter tentang ikatan yang tercipta di dalam kelompok tidak hanya dilihat dari kualitas ikatan, namun juga membangun jaringan sosial tersebut (Damsar, 2009). Terdapat beberapa aktor yang terlibat dan menjembatani hubungan antar aktor. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan merupakan aktor yang memiliki peran dalam menjembatani hubungan aktor-aktor lain. Pemerintah Kecamatan Sawangan menjembatani hubungan antara masyarakat dengan dinas terkait. Pemerintah disini menjadi instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas

segala kegiatan dalam upaya pencegahan *stunting* di Kecamatan Sawangan. Keterlibatan pemerintah Kecamatan Sawangan dalam jaringan sosial dalam upaya pencegahan *stunting* ini memberikan arus informasi terus mengalir dari pihak luar terhadap berbagai lembaga atau stakeholders. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik pendapat bahwa Mark Granovetter menyatakan bahwa keterlibatan individu atau kelompok lain membuat arus informasi mengalir dari jaringan ke jaringan lain.

Berdasarkan uraian di atas, unsur lubang struktural adalah bentuk usaha suatu pihak dalam menjembatani antara pihak-pihak yang bersangkutan dan mempunyai kepentingan dalam tujuan tertentu. Maka dari itu, lubang struktural sangat penting di dalam jaringan sosial yang menguntungkan. Dalam lingkup tersebut, lubang struktural terjadi di dalam pembentukan jaringan sosial untuk mengupayakan pencegahan *stunting* di Kecamatan Sawangan. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Sawangan dengan berbagai stakeholders dengan melalui rapat rutin selama 1 bulan, melakukan program gaspol dulur dengan rutin memberikan telur selama setiap hari sebanyak 1 kali, adanya posyandu yang teragendakan dengan didukung adanya sosialisasi dari berbagai kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), selain itu upaya lain yang dilakukan adalah dengan memberikan bantuan pemberian makanan tambahan (PMT) terhadap orang tua yang anaknya *stunting*. Berbagai upaya tersebut dapat dilakukan karena ada kedekatan antar pihak. Hubungan yang dibangun mengalami pengembangan yang ditunjukkan dengan upaya pemerintah Kecamatan Sawangan dengan berbagai stakeholder dalam merealisasikan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mencegah *stunting*. Dari pernyataan tersebut, unsur lubang struktural dalam pencegahan *stunting* di Kecamatan Sawangan dijalankan oleh aktor pelaku jaringan sosial.

c. Keterlekatan

Keterlekatan sosial merupakan kondisi meleburnya tindakan ekonomi dan tindakan non ekonomi. Melalui adanya Keterlekatan dua tindakan tersebut akan saling mempengaruhi di dalam mengatur praktik atau proses dari kegiatan ekonomi. Granovetter berpendapat mengenai Keterlekatan bersama Swedberg, yang berpendapat bahwa tindakan ekonomi adalah garis berkelanjutan diantara Keterlekatan kuat dan Keterlekatan lemah. Tindakan ini berdasarkan interaksi secara langsung diantara aktor di dalam jaringan sosial. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa di dalam jaringan sosial untuk mencegah *stunting* di Kecamatan Sawangan terdapat konsep Keterlekatan. Hal ini terjadi diantara aktor-aktor di dalam upaya mencegah *stunting* seperti pemerintah kecamatan sawangan, pemerintah desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Aisyiyah, generasi berencana (GenRe), Kantor urusan agama (KUA), pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) dan dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Kabupaten Magelang, dan Badan Pembangunan Daerah. Setiap aktor terdapat dorongan atau motivasi untuk menjalin jaringan sosial diantara aktor tersebut.

Pemerintah Kecamatan Sawangan adalah instansi pemerintah yang mempunyai tanggung jawab khususnya dalam menangani dan mencegah adanya *stunting* di Kecamatan Sawangan. Oleh sebab itu, di dalam upaya mencegah *stunting* di Kecamatan Sawangan Pemerintah Kecamatan Sawangan merupakan aktor penting di dalam membangun relasi jaringan. Berdasarkan data temuan, Pemerintah Kecamatan Sawangan tidak mempunyai motivasi di dalam mencari keuntungan, namun motivasi Pemerintah Kecamatan Sawangan adalah terkait dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan fakta di lapangan, menunjukkan bahwa Pemerintah Kecamatan Sawangan berupaya memberikan segala bentuk partisipasi dan dukungan agar Kecamatan Sawangan ini semakin maju. Salah satu bentuk dukungan Pemerintah Kecamatan Sawangan adalah

selalu membantu organisasi masyarakat yang turut serta dalam mencegah *stunting* dengan membangun relasi agar Kecamatan Sawangan ini dapat semakin maju.

Harapan dari Pemerintah Kecamatan Sawangan terkait dalam upaya mencegah angka *stunting* di Kecamatan Sawangan adalah meminimalisir jumlah angka *stunting* sehingga dapat membangun generasi yang sehat dan berdaya untuk mencapai Indonesia emas.

Dapat disimpulkan bahwa hubungan yang terjalin antara Pemerintah Kecamatan Sawangan dengan aktor jaringan sosial yang lain seperti paguyuban, masyarakat, dan dinas terkait adalah suatu strategi sosial yang telah direncanakan. Strategi tersebut merupakan suatu strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kecamatan Sawangan dalam mencegah dan meminimalisir angka *stunting* di Kecamatan Sawangan. Dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Sawangan berupaya membangun relasi jaringan untuk memperluas hubungan masyarakat sekitar dengan pihak luar yang dapat membantu masyarakat di dalam meminimalisir dan mencegah angka *stunting*. Dengan melakukan upaya untuk mencegah *stunting* seperti adanya program Gotong Sak Ceting, adanya sosialisasi terhadap Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan orang tua yang anaknya *stunting*, adanya memberikan 1 butir telur setiap hari terhadap anak yang *stunting*, sehingga diharapkan jumlah angka *stunting* diminimalisir.

Kaitannya dengan teori Keterlekatan yang menyatakan bahwa Keterlekatan adalah sebuah proses meleburnya tindakan non ekonomi dan ekonomi, hal ini sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah membangun relasi jaringan sosial untuk mencegah jumlah angka *stunting* dan meminimalisir angka *stunting*. Selain pemerintah kecamatan sawangan beberapa aktor yang berasal dari instansi pemerintah yang terlibat dalam jaringan upaya mencegah *stunting* di Kecamatan

Sawangan adalah Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Kabupaten Magelang, dan Badan Pembangunan Daerah.

Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan adalah dinas yang turut berpartisipasi, peran dari dinas kesehatan lebih mengkoordinasikan dengan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Sawangan dan Puskesmas, dinas kesehatan ini juga yang mempunyai jadwal pos pelayanan terpadu (posyandu) terhadap anak, jadwal untuk mengadakan imunisasi. Kemudian dinas sosial lebih berperan dalam melakukan sosialisasi dan rapat rutin terhadap pihak masyarakat dan penyuluh Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Sawangan, mengadakan program untuk mencegah *stunting* seperti gaspol dulur, mengawasi dan mengkoordinasikan dalam memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) terhadap anak, serta melakukan monitoring dan evaluasi, kemudian dari Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana lebih terhadap ke dalam meminimalisir adanya pernikahan dini agar angka *stunting* ini dapat dikurangi, pemberdayaan terhadap perempuan dengan memberikan tablet tambah darah untuk mencegah anemia, dan sosialisasi terhadap sekolah akan bahayanya pernikahan dini.